



**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pratikno

Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2026

Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Pratikno

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN

Kementerian : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
 Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya SDM Indonesia unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	Indeks Modal Manusia	0,57
	Indeks kinerja penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Indeks Kinerja SKP PMK)	82
	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (IKPK PMK)	Memuaskan

Program	Anggaran (Rp)
Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	61.964.442.000,-
Program Dukungan Manajemen	151.073.737.000,-
Jumlah Anggaran Efektif	213.038.179.000,-

*)Total anggaran dengan blokir menjadi Rp236.708.932.000,-.

Jakarta, Januari 2026

Menteri Koordinator Bidang
 Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,



Pratikno



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Imam Machdi
Jabatan : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pratikno
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:
Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

PIHAK PERTAMA:
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Pratikno

Imam Machdi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEMENTERIAN KOORDINATOR PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Organisasi : Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi	Nilai Reformasi Birokrasi	90,9
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap dukungan penyelenggaraan layanan Sekretariat Kementerian	Memuaskan

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	150.866.441.000,-
Koordinasi Peningkatan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	52.779.721.000,-
Jumlah Anggaran Efektif	203.646.162.000,-

*)Total anggaran dengan blokir menjadi Rp222.590.040.000,-.

Jakarta, Januari 2026

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,



Pratikno



Imam Machdi



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Woro Srihastuti Sulistyaningrum
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pratikno
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:
Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Pratikno

PIHAK PERTAMA:
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas
Keluarga dan Kependudukan,

Woro Srihastuti Sulistyaningrum

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DAN KEPENDUDUKAN

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan
Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	73,83
	Indeks Perlindungan Anak	72,33
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,430
	Mobilitas penduduk penyandang disabilitas	69,50
	Angka Kelahiran Total	2,11
	Indeks Pembangunan Gender	92,11-92,21
	Mobilitas Penduduk Lanjut Usia	94,5
	Early Childhood Development Index	89,06
	Indeks kinerja penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan	82
	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan	Memuaskan
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian Keluarga untuk Penanggulangan Kemiskinan	1,5

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan	1.565.477.000,-
Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	69.274.000,-
Jumlah Anggaran Efektif*	1.634.751.000,-

*)Total anggaran dengan blokir menjadi Rp2.365.080.000,-.

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,



Pratikno

Jakarta, Januari 2026
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas
Keluarga dan Kependudukan,



Woro Srihastuti Sulistyani Ingum



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nia Reviani
Jabatan : Asisten Deputy Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Woro Srihastuti Sulistyaningrum
Jabatan : Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:
Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas
Keluarga dan Kependudukan,

Woro Srihastuti Sulistyaningrum

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputy Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan
Pemberdayaan Perempuan,

Nia Reviani

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DAN KEPENDUDUKAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan
 Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender	92,11-92,21
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,421
	Jumlah K/L/D yang memperoleh Penghargaan Parahita Eka Praya (PPE)	7; 6; 11
	Persentase perempuan di jabatan tinggi pratama dan madya	Pratama 15; Madya 17
	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain	3,49
	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan (KTP) di ruang publik dalam 12 bulan terakhir	16,69
	Persentase perempuan korban kekerasan (termasuk TPPO) yang mendapat layanan komprehensif	85
	Jumlah perempuan korban kekerasan (termasuk TPPO) yang dilaporkan melalui SIMFONI PPA	31.655-33.094
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) dalam penyelesaian isu strategis di bidang Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan dalam mendukung Capaian Indeks Modal Manusia	1
	Indeks kinerja terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan	82
	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan	Memuaskan
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi bidang Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pelaksanaan Aksi Reformasi Birokrasi Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian Keluarga untuk Penanggulangan Kemiskinan	100%

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Sosial	147.888.000,-
Koordinasi	87.874.000,-
Jumlah Anggaran Efektif*	235.762.000,-

*)Total anggaran dengan blokir menjadi Rp410.762.000,-.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas
 Keluarga dan Kependudukan,



Woro Srihastuti Sulistyaningrum

Jakarta, Januari 2026
 Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan
 Pemberdayaan Perempuan,



Nia Reviani



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Woro Srihastuti Sulistyaningrum
Jabatan : Plt. Asisten Deputi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Woro Srihastuti Sulistyaningrum
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas
Keluarga dan Kependudukan,

Woro Srihastuti Sulistyaningrum

PIHAK PERTAMA:
Plt. Asisten Deputi Perlindungan dan Pemenuhan
Hak Anak,

Woro Srihastuti Sulistyaningrum

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DAN KEPENDUDUKAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
 Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak	72,33
	Indeks Perlindungan Khusus Anak	83,42
	Persentase anak berusia 13-17 tahun yang mengalami salah satu bentuk kekerasan fisik, emosional atau seksual dalam 12 bulan terakhir	Laki-laki: 24,63 Perempuan: 31,06
	Proporsi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan dan memperoleh layanan	2,48
	Jumlah kabupaten/kota dengan peringkat dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	KLA: 0; Utama: 21; Nindya : 78; Madya: 134; Pratama: 145
	<i>Early Childhood Development Index</i>	89,06
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) dalam penyelesaian isu strategis di bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dalam mendukung Capaian Indeks Modal Manusia	1
	Indeks kinerja terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	82
	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Memuaskan
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak	Persentase Pelaksanaan Aksi Reformasi Birokrasi Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian Keluarga untuk Penanggulangan Kemiskinan	100%

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Sosial	228.390.000,-
Koordinasi	168.072.000,-
Jumlah Anggaran Efektif*	396.462.000,-

*)Total anggaran dengan blokir menjadi Rp532.971.000,-.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas
 Keluarga dan Kependudukan,



Woro Srihastuti Sulistyaningrum

Jakarta, Januari 2026
 Plt. Asisten Deputi Perlindungan dan
 Pemenuhan Hak Anak,



Woro Srihastuti Sulistyaningrum



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mustikorini Indrijatiningrum
Jabatan : Asisten Deputy Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kependudukan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Woro Srihastuti Sulistyaningrum
Jabatan : Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:

Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas
Keluarga dan Kependudukan,

Woro Srihastuti Sulistyaningrum

PIHAK PERTAMA:

Asisten Deputy Ketahanan Keluarga dan
Pembangunan Kependudukan,

Mustikorini Indrijatiningrum

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DAN KEPENDUDUKAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kependudukan
 Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang Ketahanan Keluarga dan Kependudukan	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	73,83
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	65,8
	Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	22,5
	Persentase calon pengantin yang mendapat skrining kesehatan	55
	Persentase calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan	50
	Angka Kelahiran Total	2,11
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) dalam penyelesaian isu strategis di bidang Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kependudukan dalam mendukung Capaian Indeks Modal Manusia	1
	Indeks kinerja terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kependudukan	82
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi bidang Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kependudukan	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kependudukan	Memuaskan
	Persentase Pelaksanaan Aksi Reformasi Birokrasi Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian Keluarga untuk Penanggulangan Kemiskinan	100%

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Sosial	410.047.000,-
Koordinasi	311.947.000,-
Jumlah Anggaran Efektif*	721.994.000,-

*)Total anggaran dengan blokir menjadi Rp895.574.000,-.

Jakarta, Januari 2026

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan,



Woro Srihastuti Sulistyaningrum

Asisten Deputi Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kependudukan,



Mustikorini Indrijatiningrum



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ricky Radius Siregar

Jabatan : Asisten Deputi Kesejahteraan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Woro Srihastuti Sulistyaningrum

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas
Keluarga dan Kependudukan,

Woro Srihastuti Sulistyaningrum

PIHAK PERTAMA:

Asisten Deputi Kesejahteraan Lanjut Usia dan
Penyandang Disabilitas,

Ricky Radius Siregar

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DAN KEPENDUDUKAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Kesejahteraan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas
 Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	Mobilitas Penduduk Lanjut Usia	94,50
	Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas	69,50
	Persentase lansia yang mendapatkan pendampingan	12
	Persentase satuan pendidikan menerapkan pendidikan inklusif yang meningkat mutu pembelajarannya	13,82
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) dalam penyelesaian isu strategis di bidang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas dalam mendukung Capaian Indeks Modal Manusia	1
	Indeks kinerja terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	82
	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	Memuaskan
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi bidang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	Persentase Pelaksanaan Aksi Reformasi Birokrasi Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian Keluarga untuk Penanggulangan Kemiskinan	100%

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Sosial	126.562.000,-
Koordinasi	84.697.000,-
Jumlah Anggaran Efektif*	211.259.000,-

*)Total anggaran dengan blokir menjadi Rp439.531.000,-

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas
 Keluarga dan Kependudukan,



Woro Srihastuti Sulistyoningrum

Jakarta, Januari 2026

Asisten Deputi Kesejahteraan Lanjut Usia dan
 Penyandang Disabilitas,



Ricky Radius Siregar



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Javan Herdamang Pajrin
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Woro Srihastuti Sulistyaningrum
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas
Keluarga dan Kependudukan,

Woro Srihastuti Sulistyaningrum

PIHAK PERTAMA:

Kepala Bagian Tata Usaha, Deputi Bidang
Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan
Kependudukan,

Javan Herdamang Pajrin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DAN KEPENDUDUKAN

Unit Satuan Kerja : Kepala Bagian Tata Usaha, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan
 Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan	Persentase penyelesaian draf Dokumen Program dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan	90 - 100% draft dokumen selesai
	Persentase penyelesaian draf Dokumen Monitoring dan Evaluasi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan	90 - 100% draft dokumen selesai
	Indeks Profesionalisme ASN Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan	80

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Layanan Dukungan Manajemen Internal	66.000.000,-
Layanan Manajemen Kinerja Internal	3.274.000,-
Jumlah Anggaran Efektif	69.274.000,-

*Total anggaran dengan blokir menjadi Rp86.242.000,-

Jakarta, Januari 2026

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan,



Woro Srihastuti Sulistyaningrum

Kepala Bagian Tata Usaha, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan,



Javan Herdamang Pajrin



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sukadiono
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pratikno
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:
Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

PIHAK PERTAMA:
Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Kesehatan,

Pratikno



Sukadiono

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN

Unit Organisasi Eselon I
 Tahun Anggaran

: Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan
 : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan	Usia harapan hidup (UHH)	74,68
	Angka Kematian Balita	13,8
	Prevalensi <i>Stunting</i>	17,5
	Angka Kematian Penduduk Dewasa (Usia 15-60 Tahun)	Menurun
	Indeks kinerja penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan	82
	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan	Memuaskan
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Peningkatan Kualitas dan akses layanan kesehatan	1,5

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan	1.799.328.000,-
Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	5.023.000,-
Jumlah Anggaran Efektif*	1.805.351.000,-

*) Total anggaran dengan blokir menjadi Rp2.773.109.000,-.

Menteri Koordinator
 Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Pratikno

Jakarta, Januari 2026
 Deputi Bidang Koordinasi
 Peningkatan Kualitas Kesehatan,



Sukadiono



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jelsi Natalia Marampa
Jabatan : Asisten Deputi Peningkatan Gizi dan Pencegahan Stunting

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Sukadiono
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas
Kesehatan,

Sukadiono

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputi Peningkatan Gizi dan
Pencegahan Stunting,

Jelsi Natalia Marampa

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Peningkatan Gizi dan Pencegahan Stunting
 Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang Peningkatan gizi dan pencegahan stunting	Angka Kematian ibu	109
	Angka Kematian balita	13,8
	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek)	17,5
	Prevalensi remaja putri anemia	23
	Persentase pekerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan kerja	20
	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat	17
	Jumlah KLB keracunan pangan	200
	Persentase ibu hamil yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	50
	Persentase ibu menyusui yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	50
	Persentase balita yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	50
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) dalam penyelesaian isu strategis di bidang Peningkatan Gizi dan Pencegahan Stunting	1
	Indeks Kinerja terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Peningkatan Gizi dan Pencegahan Stunting	82
	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Peningkatan Gizi dan Pencegahan Stunting	Memuaskan
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi bidang Peningkatan Gizi dan Pencegahan Stunting	Persentase Pelaksanaan Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan	100%

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Kesehatan	113.397.000,-
Koordinasi	333.006.000,-
Jumlah Anggaran Efektif*	446.403.000,-

*)Total anggaran dengan blakir menjadi Rp690.016.000,-.

Jakarta, Januari 2026

Deputi Bidang Koordinasi
 Peningkatan Kualitas Kesehatan,



Sukadiono

Asisten Deputi
 Peningkatan Gizi dan Pencegahan Stunting,



Jelsi Natalia Marampa



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Redemtus Alfredo Sani Fenat
Jabatan : Asisten Deputi Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Sukadiono
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Kesehatan,

Sukadiono

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputi Peningkatan Sumber Daya
Kesehatan,

Redemtus Alfredo Sani Fenat

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
 Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Persentase kab/kota dengan pemenuhan obat dan vaksin tepat waktu dan tepat jumlah	70
	Persentase penurunan kekosongan (<i>stock out</i>) obat dan vaksin di fasyankes	15
	Persentase obat yang aman dan bermutu	91
	Persentase obat bahan alam yang aman dan bermutu	66
	Persentase suplemen kesehatan yang aman dan bermutu	68
	Persentase kosmetik yang aman dan bermutu	62
	Persentase puskesmas dengan SDM kesehatan sesuai standar	22
	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	71
	Jumlah kab/kota dengan SDM kesehatan puskesmas sesuai standar	37
	Jumlah kab/kota dengan jenis dokter spesialis pada RS sesuai standar	290
	Rasio dokter spesialis (per 1.000 penduduk)	0.19
	Jumlah RS pemerintah yang memenuhi tingkat maturitas kemandirian	10
	Kab/kota dengan RSUD tipe D yang ditingkatkan menjadi tipe C	32
	Kab/kota dengan wilayah berciri kepulauan yang dilayani RS kapal sesuai standar	27
	Persentase sistem informasi data kesehatan yang telah terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	40
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	55
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem rujukan online nasional	30
	Persentase belanja kesehatan <i>out of pocket</i> masyarakat berpengeluaran 40% terbawah	3,98
	Persentase pertumbuhan belanja kesehatan dari sektor publik	5
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) dalam penyelesaian isu strategis di bidang Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	1
	Indeks Kinerja terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	82
	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Memuaskan
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi bidang Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Persentase Pelaksanaan Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan	100%

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Kesehatan	436.954.000,-
Koordinasi	123.569.000,-
Jumlah Anggaran Efektif*	560.523.000,-

*Jumlah anggaran dengan blokir menjadi Rp805.998.000,-.

Deputi Bidang Koordinasi
 Peningkatan Kualitas Kesehatan,



Sukadiono

Jakarta, Januari 2026
 Asisten Deputi
 Peningkatan Sumber Daya Kesehatan,



Redemtus Alfredo Sani Fenat



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nancy Dian Anggraeni
Jabatan : Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan Kesehatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Sukadiono
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Kesehatan,

Sukadiono

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas dan
Ketahanan Kesehatan,

Nancy Dian Anggraeni

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan Kesehatan
 Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan Kesehatan	Angka Kematian Penduduk Dewasa (Usia 15-60 Tahun)	Menurun
	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	252
	Insidensi HIV	0.07
	Kabupaten/Kota eliminasi Malaria	460
	Persentase Diabetes dalam pengendalian	17,5
	Kabupaten/kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	55
	Persentase merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4
	Persentase kab/kota dengan pengendalian kejadian luar biasa(KLB)/wabah	50
	Jumlah kab/kota eliminasi Rabies	440
	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	70
	Persentase RS Pemerintah yang patuh memberikan antibiotik sistemik empiric sesuai standar	15
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) dalam penyelesaian isu strategis di bidang Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan Kesehatan	1
	Indeks Kinerja terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan Kesehatan	82
	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan Kesehatan	Memuaskan
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi bidang Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan Kesehatan	Persentase Pelaksanaan Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan	100%

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Kesehatan	103.000.000,-
Koordinasi	87.716.000,-
Jumlah Anggaran Efektif*	190.716.000,-

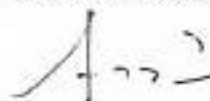
*)Total anggaran dengan blokir menjadi Rp623.910.000,-.

Deputi Bidang Koordinasi
 Peningkatan Kualitas Kesehatan,



Sukadiono

Jakarta, Januari 2026
 Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas dan
 Ketahanan Kesehatan,



Nancy Dian Anggraeni



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anitha
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Sukadiono
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Kesehatan,

Sukadiono

PIHAK PERTAMA:
Kepala Bagian Tata Usaha, Deputi Bidang
Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan,

Anitha

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN

Unit Satuan Kerja : Kepala Bagian Tata Usaha, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan
 Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan	Persentase penyelesaian draf Dokumen Program dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan	90 - 100% draft dokumen selesai
	Persentase penyelesaian draf Dokumen Monitoring dan Evaluasi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan	90 - 100% draft dokumen selesai
	Indeks Profesionalisme ASN Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan	80

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Layanan Dukungan Manajemen Internal	4.484.000,-
Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.539.000,-
Jumlah Anggaran Efektif*	6.023.000,-

*)Total anggaran dengan blokir menjadi Rp9.130.000.

Jakarta, Januari 2026

Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Kesehatan,

Kepala Bagian Tata Usaha, Deputi Bidang
Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan,



Sukadiono



Anitha



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Linda Restaningrum
Jabatan : Asisten Deputi Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Sukadiono
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Kesehatan,

Sukadiono

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputi Peningkatan Akses dan Mutu
Pelayanan Kesehatan,

Linda Restaningrum

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
 Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Usia harapan hidup (UHH)	74,68
	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	46
	Prevalensi depresi di umur ≥ 15 tahun	1,4
	Persentase kab/kota dengan cakupan pemeriksaan kesehatan gratis $>80\%$	60
	Persentase puskesmas terakreditasi paripurna	28
	Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia balita dan anak usia pra sekolah	55
	Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia sekolah dan remaja	35
	Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia dewasa	45
	Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia lansia	55
	Cakupan pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji	100
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) dalam penyelesaian isu strategis di bidang Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kualitas Kesehatan	1
	Indeks Kinerja terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	82
	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Memuaskan
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi bidang Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Pelaksanaan Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan	100%

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Kesehatan	396.631.000,-
Koordinasi	205.055.000,-
Jumlah Anggaran Efektif*	601.686.000,-

*)Total anggaran dengan blokir menjadi Rp644.055.000,-.

Deputi Bidang Koordinasi
 Peningkatan Kualitas Kesehatan,


 Sukadiono

Jakarta, Januari 2026
 Asisten Deputi Peningkatan Akses dan Mutu
 Pelayanan Kesehatan,


 Linda Restaningrum



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sukadiono
Jabatan : Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pratikno
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:
Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

PIHAK PERTAMA:
Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Kesehatan,

Pratikno

Sukadiono

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN

Unit Organisasi Eselon I
 Tahun Anggaran

: Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan
 : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan	Usia harapan hidup (UHH)	74,68
	Angka Kematian Balita	13,8
	Prevalensi <i>Stunting</i>	17,5
	Angka Kematian Penduduk Dewasa (Usia 15-60 Tahun)	Menurun
	Indeks kinerja penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan	82
	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan	Memuaskan
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Peningkatan Kualitas dan akses layanan kesehatan	1,5

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan	1.799.328.000,-
Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	6.023.000,-
Jumlah Anggaran Efektif*	1.805.351.000,-

*) Total anggaran dengan blokir menjadi Rp2.773.109.000,-.

Menteri Koordinator
 Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Jakarta, Januari 2026
 Deputi Bidang Koordinasi
 Peningkatan Kualitas Kesehatan,



Pratikno



Sukadiono



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jelsi Natalia Marampa
Jabatan : Asisten Deputi Peningkatan Gizi dan Pencegahan Stunting

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Sukadiono
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas
Kesehatan,

Sukadiono

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputi Peningkatan Gizi dan
Pencegahan Stunting,

Jelsi Natalia Marampa

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Peningkatan Gizi dan Pencegahan Stunting
 Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang Peningkatan gizi dan pencegahan stunting	Angka Kematian ibu	109
	Angka Kematian balita	13,8
	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek)	17,5
	Prevalensi remaja putri anemia	23
	Persentase pekerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan kerja	20
	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat	17
	Jumlah KLB keracunan pangan	200
	Persentase ibu hamil yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	50
	Persentase ibu menyusui yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	50
	Persentase balita yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	50
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) dalam penyelesaian isu strategis di bidang Peningkatan Gizi dan Pencegahan Stunting	1
	Indeks Kinerja terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Peningkatan Gizi dan Pencegahan Stunting	82
	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Peningkatan Gizi dan Pencegahan Stunting	Memuaskan
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi bidang Peningkatan Gizi dan Pencegahan Stunting	Persentase Pelaksanaan Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan	100%

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Kesehatan	113.397.000,-
Koordinasi	333.006.000,-
Jumlah Anggaran Efektif*	446.403.000,-

*)Total anggaran dengan blakir menjadi Rp690.016.000,-.

Jakarta, Januari 2026

Deputi Bidang Koordinasi
 Peningkatan Kualitas Kesehatan,



Sukadiono

Asisten Deputi
 Peningkatan Gizi dan Pencegahan Stunting,



Jelsi Natalia Marampa



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Redemtus Alfredo Sani Fenat
Jabatan : Asisten Deputi Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Sukadiono
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Kesehatan,

Sukadiono

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputi Peningkatan Sumber Daya
Kesehatan,

Redemtus Alfredo Sani Fenat

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
 Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Persentase kab/kota dengan pemenuhan obat dan vaksin tepat waktu dan tepat jumlah	70
	Persentase penurunan kekosongan (<i>stock out</i>) obat dan vaksin di fasyankes	15
	Persentase obat yang aman dan bermutu	91
	Persentase obat bahan alam yang aman dan bermutu	66
	Persentase suplemen kesehatan yang aman dan bermutu	68
	Persentase kosmetik yang aman dan bermutu	62
	Persentase puskesmas dengan SDM kesehatan sesuai standar	22
	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	71
	Jumlah kab/kota dengan SDM kesehatan puskesmas sesuai standar	37
	Jumlah kab/kota dengan jenis dokter spesialis pada RS sesuai standar	290
	Rasio dokter spesialis (per 1.000 penduduk)	0.19
	Jumlah RS pemerintah yang memenuhi tingkat maturitas kemandirian	10
	Kab/kota dengan RSUD tipe D yang ditingkatkan menjadi tipe C	32
	Kab/kota dengan wilayah berciri kepulauan yang dilayani RS kapal sesuai standar	27
	Persentase sistem informasi data kesehatan yang telah terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	40
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	55
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem rujukan online nasional	30
	Persentase belanja kesehatan <i>out of pocket</i> masyarakat berpengeluaran 40% terbawah	3,98
	Persentase pertumbuhan belanja kesehatan dari sektor publik	5
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) dalam penyelesaian isu strategis di bidang Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	1
	Indeks Kinerja terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	82
	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Memuaskan
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi bidang Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Persentase Pelaksanaan Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan	100%

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Kesehatan	436.954.000,-
Koordinasi	123.569.000,-
Jumlah Anggaran Efektif*	560.523.000,-

*Jumlah anggaran dengan blokir menjadi Rp805.998.000,-.

Deputi Bidang Koordinasi
 Peningkatan Kualitas Kesehatan,



Sukadiono

Jakarta, Januari 2026
 Asisten Deputi
 Peningkatan Sumber Daya Kesehatan,



Redemtus Alfredo Sani Fenat



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nancy Dian Anggraeni
Jabatan : Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan Kesehatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Sukadiono
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Kesehatan,

Sukadiono

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas dan
Ketahanan Kesehatan,

Nancy Dian Anggraeni

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan Kesehatan
 Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan Kesehatan	Angka Kematian Penduduk Dewasa (Usia 15-60 Tahun)	Menurun
	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	252
	Insidensi HIV	0.07
	Kabupaten/Kota eliminasi Malaria	460
	Persentase Diabetes dalam pengendalian	17,5
	Kabupaten/kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	55
	Persentase merokok pada penduduk 10-21 tahun	11,4
	Persentase kab/kota dengan pengendalian kejadian luar biasa(KLB)/wabah	50
	Jumlah kab/kota eliminasi Rabies	440
	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	70
	Persentase RS Pemerintah yang patuh memberikan antibiotik sistemik empiric sesuai standar	15
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) dalam penyelesaian isu strategis di bidang Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan Kesehatan	1
	Indeks Kinerja terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan Kesehatan	82
	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan Kesehatan	Memuaskan
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi bidang Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan Kesehatan	Persentase Pelaksanaan Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan	100%

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Kesehatan	103.000.000,-
Koordinasi	87.716.000,-
Jumlah Anggaran Efektif*	190.716.000,-

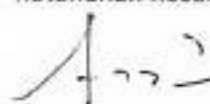
*Jumlah anggaran dengan blokir menjadi Rp623.910.000,-.

Deputi Bidang Koordinasi
 Peningkatan Kualitas Kesehatan,



Sukadiono

Jakarta, Januari 2026
 Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas dan
 Ketahanan Kesehatan,



Nancy Dian Anggraeni



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anitha
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Sukadiono
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Kesehatan,

Sukadiono

PIHAK PERTAMA:
Kepala Bagian Tata Usaha, Deputi Bidang
Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan,

Anitha

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN

Unit Satuan Kerja : Kepala Bagian Tata Usaha, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan
 Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan	Persentase penyelesaian draf Dokumen Program dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan	90 - 100% draft dokumen selesai
	Persentase penyelesaian draf Dokumen Monitoring dan Evaluasi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan	90 - 100% draft dokumen selesai
	Indeks Profesionalisme ASN Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan	80

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Layanan Dukungan Manajemen Internal	4.484.000,-
Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.539.000,-
Jumlah Anggaran Efektif*	6.023.000,-

*) Total anggaran dengan blokir menjadi Rp9.130.000.

Jakarta, Januari 2026

Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Kesehatan,

Kepala Bagian Tata Usaha, Deputi Bidang
Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan,



Sukadiono



Anitha



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Linda Restaningrum
Jabatan : Asisten Deputi Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Sukadiono
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Kesehatan,

Sukadiono

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputi Peningkatan Akses dan Mutu
Pelayanan Kesehatan,

Linda Restaningrum

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
 Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Usia harapan hidup (UHH)	74,68
	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	46
	Prevalensi depresi di umur ≥ 15 tahun	1,4
	Persentase kab/kota dengan cakupan pemeriksaan kesehatan gratis $>80\%$	60
	Persentase puskesmas terakreditasi paripurna	28
	Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia balita dan anak usia pra sekolah	55
	Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia sekolah dan remaja	35
	Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia dewasa	45
	Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia lansia	55
	Cakupan pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji	100
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) dalam penyelesaian isu strategis di bidang Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kualitas Kesehatan	1
	Indeks Kinerja terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	82
	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Memuaskan
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi bidang Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Pelaksanaan Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan	100%

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Kesehatan	396.631.000,-
Koordinasi	205.055.000,-
Jumlah Anggaran Efektif*	601.686.000,-

*)Total anggaran dengan blokir menjadi Rp644.055.000,-.

Deputi Bidang Koordinasi
 Peningkatan Kualitas Kesehatan,


 Sukadiono

Jakarta, Januari 2026
 Asisten Deputi Peningkatan Akses dan Mutu
 Pelayanan Kesehatan,


 Linda Restaningrum



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ojat Darajat
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pratikno
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:
Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Pratikno

PIHAK PERTAMA:
Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Pendidikan,

Ojat Darajat

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan
 Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,36
	Rata-rata nilai asesmen tingkat nasional a) Literasi membaca; b) numerasi	63,89;55,86
	Rata-Rata Nilai Pisa : a) Membaca; b) Matematika; c) Sains	396;404;416
	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 Tahun	9,45
	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi	67
	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	11,49
	Peringkat Indeks Inovasi Global	52
	Tingkat penyelesaian jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat	68,07
	Jumlah anak tidak sekolah usia 6-18 tahun	3.546.145
	Persentase satuan pendidikan yang memiliki indikator kualitas pembelajaran dengan kategori baik	44,84
	Persentase penduduk dengan pendidikan minimal SMA	laki-laki: 43,73 perempuan: 39,35
	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: a) literasi membaca; b) numerasi	51,67;43,52
	Early Childhood Development Index (ECDI)	88,3
	Indeks Pemerataan Guru (PP)	34,91
	Indeks kinerja penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan	82
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan	Memuaskan
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan	Nilai reformasi birokrasi tematik mendorong peningkatan akses, kualitas, dan mutu pendidikan	1,5
	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik pengelolaan sumber daya dan hilirisasi melalui riset, teknologi, dan kemitraan industri	1,5

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan	1.745.823.000,-
Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	77.999.000,-
Jumlah Anggaran Efektif*	1.823.822.000,-

*Jumlah anggaran dengan blokir menjadi Rp2.692.333.000,-.

Menteri Koordinator
 Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,



Pratikno

Jakarta, Januari 2026
 Deputi Bidang Koordinasi
 Peningkatan Kualitas Pendidikan,



Ojat Darajat



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jazziray Hartoyo
Jabatan : Asisten Deputi Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ojat Darajat
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Pendidikan,

Ojat Darajat

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputi Pendidikan Anak
Usia Dini dan Dasar,

Jazziray Hartoyo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar
 Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar	Jumlah anak tidak sekolah usia 6–18 tahun	3.546.145
	Satuan Pendidikan Formal, Satuan Pendidikan Nonformal, Satuan Pendidikan Informal, Madrasah, Satuan Pendidikan Umum dengan Kekhasan Agama dan Satuan Pendidikan Keagamaan yang melaksanakan renovasi dan revitalisasi	60.000
	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) literasi membaca; (b) numerasi	(a) 51,67; (b) 43,52
	Early Childhood Development Index (ECDI)	89,06
	Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB/Sederajat yang pernah mengikuti PAUD	64,60
	Pemberian bantuan buku tulisan secara gratis kepada anak-anak sekolah	41.600.000
	Rata-Rata Nilai Pisa : Membaca, Matematika, Sains	396,404,416
	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 Tahun	9,82
	Harapan Lama Sekolah	13,8
	Rata-Rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: 1) Literasi, 2) Numerasi	1) 66,89, 2) 59,86
	Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan secara formal	75
	Persentase satuan pendidikan formal pesantren yang memperoleh hasil asesmen minimal jayyid	15
	Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran	65,34
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) dalam penyelesaian isu strategis di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar	1
	Indeks kinerja terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar	82
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar	Memuaskan
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar	Persentase pelaksanaan aksi reformasi birokrasi tematik mendorong peningkatan akses, kualitas, dan mutu pendidikan	100%

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan, dan Kebudayaan	352.077.000,-
Koordinasi	144.614.000,-
Jumlah Anggaran Efektif*	496.691.000,-

*)Total anggaran dengan blokir menjadi Rp673.366.000,-.

Deputi Bidang Koordinasi
 Peningkatan Kualitas Pendidikan,


 Ojat Darajat

Jakarta, Januari 2026
 Asisten Deputi Pendidikan Anak
 Usia Dini dan Dasar,


 Jazziray Hartoyo



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maman Wijaya
Jabatan : Asisten Deputi Pendidikan Menengah dan Tinggi

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ojat Darajat
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Pendidikan,

Ojat Darajat

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputi
Pendidikan Menengah dan Tinggi,

Maman Wijaya

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pendidikan Menengah dan Tinggi
 Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi	Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat THE Impact Ranking SDGs: (a) Top 300 (b) Top 600 (c) Top 1000	(a) 8; (b) 13; (c) 23
	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/ sederajat	87,76
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	34,92
	Tingkat penyelesaian jenjang SMA/SMK/MA/ Sederajat	68,07
	Persentase penduduk dengan pendidikan minimal SMA: a) Laki-Laki b) Perempuan	a) 43,73 b) 39,35
	Jumlah unit sekolah unggul baru yang beroperasi	4
	Jumlah sekolah unggul transformasi yang terbina	30
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) dalam penyelesaian isu strategis di bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi	1
	Indeks kinerja terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi	882
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi	Memuaskan
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi	Persentase pelaksanaan aksi reformasi birokrasi tematik mendorong peningkatan akses, kualitas, dan mutu pendidikan	100%

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran Efektif (Rp)
Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan, dan Kebudayaan	294.110.000,-
Koordinasi	89.998.000,-
Jumlah Anggaran Efektif*	384.108.000,-

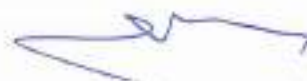
*)Total anggaran dengan blokir menjadi Rp591.108.000,-.

Deputi Bidang Koordinasi
 Peningkatan Kualitas Pendidikan,



Ojat Darajat

Jakarta, Januari 2026
 Asisten Deputi
 Pendidikan Menengah dan Tinggi,



Maman Wijaya



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Katiman
Jabatan : Asisten Deputi Riset, Teknologi, dan Kemitraan Industri

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ojat Darajat
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Pendidikan,

Ojat Darajat

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputi
Riset, Teknologi, dan Kemitraan Industri,

Katiman

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Riset, Teknologi, dan Kemitraan Industri
 Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang teknologi informasi bidang Riset, Teknologi, dan Kemitraan Industri	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi	67
	Jumlah paten <i>granted</i> dari perguruan tinggi	17,5
	Rasio SDM iptek per satu juta penduduk	1.292
	Peringkat Indeks Inovasi Global	52
	Persentase satuan pendidikan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran	17,07*
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) dalam penyelesaian isu strategis di bidang Riset, Teknologi, dan Kemitraan Industri	1
	Indeks kinerja terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Riset, Teknologi, dan Kemitraan Industri	82
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Riset, Teknologi, dan Kemitraan Industri	Memuaskan
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi bidang Riset, Teknologi, dan Kemitraan Industri	Persentase pelaksanaan aksi reformasi birokrasi tematik pengelolaan sumber daya dan hilirisasi riset, teknologi, dan kemitraan industri	100%

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan, dan Kebudayaan	107.400.000,-
Koordinasi	259.765.000,-
Jumlah Anggaran Efektif*	367.165.000,-

*}Total anggaran dengan blokir menjadi Rp703.627.000,-.

Jakarta, Januari 2026

Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Pendidikan,



Ojat Darajat

Asisten Deputi
Riset, Teknologi, dan Kemitraan Industri,



Katiman



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Veronica Enda Wulandari
Jabatan : Asisten Deputi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ojat Darajat
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Pendidikan,

Ojat Darajat

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputi
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Pendidikan,

Veronica Enda Wulandari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan
 Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan	Indeks Pemerataan Guru	34,91
	Persentase satuan pendidikan yang memiliki indikator kualitas pembelajaran kategori baik	44,84
	Persentase pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama pada satuan Pendidikan	70,35
	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan	60,43
	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal	85,06
	Persentase Dosen yang menduduki jabatan lektor/lektor kepala/guru besar	44,8
	Proporsi dosen yang memiliki sertifikat dosen	51,82
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) dalam penyelesaian isu strategis di bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan	1
	Indeks kinerja terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan	82
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan	Memuaskan
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan	Persentase pelaksanaan aksi reformasi birokrasi tematik mendorong peningkatan akses, kualitas, dan mutu pendidikan	100%

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan, dan Kebudayaan	407.116.000,-
Koordinasi	90.743.000,-
Jumlah Anggaran Efektif*	497.859.000,-

*)Total anggaran dengan blokir menjadi Rp643.459.000,-.

Deputi Bidang Koordinasi
 Peningkatan Kualitas Pendidikan,



Ojat Darajat

Jakarta, Januari 2026
 Asisten Deputi
 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
 Pendidikan,



Veronica Enda Wulandari



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puji Wahyugiono
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ojat Darajat
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang
Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan,

Ojat Darajat

PIHAK PERTAMA:
Kepala Bagian Tata Usaha,
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas
Pendidikan,

Puji Wahyugiono

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN

Unit Satuan Kerja : Kepala Bagian Tata Usaha, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan
 Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan	Persentase penyelesaian draf Dokumen Program dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan	90 - 100% draft dokumen selesai
	Persentase penyelesaian draf Dokumen Monitoring dan Evaluasi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan	90 - 100% draft dokumen selesai
	Indeks Profesionalisme ASN Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan	80

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Layanan Dukungan Manajemen Internal	23.819.000,-
Layanan Manajemen Kinerja Internal	54.180.000,-
Jumlah Anggaran*	77.999.000,-

*)Total anggaran dengan blokir menjadi Rp80.773.000.

Deputi Bidang
Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan,



Ojat Darajat

Jakarta, Januari 2026
Kepala Bagian Tata Usaha,
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan,



Puji Wahyugiono



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Warsito
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pratikno
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:
Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

PIHAK PERTAMA:
Deputi Bidang Koordinasi
Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa,

Pratikno

Warsito

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGUATAN KARAKTER DAN JATI DIRI BANGSA

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa
 Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	67,02
	Indeks Pembangunan Pemuda	67,24
	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga	10,8-11,94
	Peringkat pada Asian Games	9-11
	Peringkat pada Asian Para Games	5-7
	Peringkat pada ASEAN Para Games	1-2
	Nilai dimensi budaya literasi dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	64,36
	Indeks kinerja penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	82
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	Memuaskan
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	Nilai reformasi birokrasi tematik penguatan kewirausahaan untuk mendorong peningkatan investasi	1,5

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	2.151.467.000,-
Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	45.600.000,-
Jumlah Anggaran Efektif*	2.197.067.000,-

*|Total anggaran dengan blokir menjadi Rp3.361.215.000,-.

Menteri Koordinator
 Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,



Pratikno

Jakarta, Januari 2026
 Deputi Bidang Koordinasi
 Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa,



Warsito



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Saufi
Jabatan : Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda dan Peningkatan Prestasi Bangsa

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Warsito
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang Koordinasi
Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa,


Warsito

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda dan
Peningkatan Prestasi Bangsa,


Ahmad Saufi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGUATAN KARAKTER DAN JATI DIRI BANGSA

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda dan Peningkatan Prestasi Bangsa
 Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang Pemberdayaan Pemuda dan Peningkatan Prestasi Bangsa	Peringkat pada Asean Para Games	1-2
	Peringkat pada Asian Games	9-11
	Peringkat pada Asian Para Games	5-7
	Indeks Pembangunan Pemuda	67,24
	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga	10,8-11,94
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) dalam penyelesaian isu strategis di bidang Pemberdayaan Pemuda dan Peningkatan Prestasi Bangsa	1
	Indeks kinerja terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Pemberdayaan Pemuda dan Peningkatan Prestasi Bangsa	82
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Pemberdayaan Pemuda dan Peningkatan Prestasi Bangsa	Memuaskan
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi bidang Pemberdayaan Pemuda dan Peningkatan Prestasi Bangsa	Persentase pelaksanaan aksi reformasi birokrasi tematik penguatan kewirausahaan untuk mendorong peningkatan investasi	100%

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	420.431.000,-
Koordinasi	223.268.000,-
Jumlah Anggaran Efektif*	643.699.000,-

*)Total anggaran dengan blokir menjadi Rp869.849.000,-.

Jakarta, Januari 2026

Deputi Bidang Koordinasi
 Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa,


 Warsito

Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda dan
 Peningkatan Prestasi Bangsa,


 Ahmad Saufi



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asep Sunandar
Jabatan : Asisten Deputi Bina Keagamaan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Warsito
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang Koordinasi
Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa,



Warsito

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputi Bina Keagamaan,



Asep Sunandar

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGUATAN KARAKTER DAN JATI DIRI BANGSA

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Bina Keagamaan
 Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang Bina Keagamaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	77,14
	Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) (a) layanan haji dalam negeri (b) layanan haji luar negeri	{a} 91,25; {b} 88,75
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) dalam penyelesaian isu strategis di bidang Bina Keagamaan	1
	Indeks kinerja terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Bina Keagamaan	82
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Bina Keagamaan	Memuaskan
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi bidang Bina Keagamaan	Persentase pelaksanaan aksi reformasi birokrasi tematik penguatan kewirausahaan untuk mendorong peningkatan investasi	100%

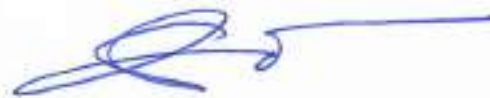
Klasifikasi Rincian <i>Output</i>	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	413.213.000,-
Koordinasi	87.719.000,-
Jumlah Anggaran Efektif*	500.932.000,-

*)Total anggaran dengan blokir menjadi Rp862.466.000,-.

Deputi Bidang Koordinasi
 Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa,


 Warsito

Jakarta, Januari 2026
 Asisten Deputi Bina Keagamaan,


 Asep Sunandar



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ivan Syamsurizal
Jabatan : Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Warsito
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi; dan

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang Koordinasi
Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa,


Warsito

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian
Kebudayaan,


Ivan Syamsurizal

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGUATAN KARAKTER DAN JATI DIRI BANGSA

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan
 Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan	Nilai dimensi budaya literasi IPK	64,36
	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,99
	Indeks Pembangunan Kebahasaan	52,72
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) dalam penyelesaian isu strategis di bidang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan	1
	Indeks kinerja terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan	82
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan	Memuaskan
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi bidang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan	Persentase pelaksanaan aksi reformasi birokrasi tematik penguatan kewirausahaan untuk mendorong peningkatan investasi	100%

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	359.072.000,-
Koordinasi	103.615.000,-
Jumlah Anggaran Efektif*	462.687.000,-

*)Total anggaran dengan blokir menjadi Rp690.916.000,-.

Deputi Bidang Koordinasi
 Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa,


 Warsito

Jakarta, Januari 2026
 Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian
 Kebudayaan,


 Ivan Syamsurizal



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wiwiek Setiowati
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha, Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Warsito
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang Koordinasi
Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa,


Warsito

PIHAK PERTAMA:
Kepala Bagian Tata Usaha, Deputi Bidang
Koordinasi Penguatan Karakter dan
Jati Diri Bangsa,


Wiwiek Setiowati

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGUATAN KARAKTER DAN JATI DIRI BANGSA

Unit Satuan Kerja : Kepala Bagian Tata Usaha, Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa
 Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi Deputi Bidang Koordinasi Karakter dan Jati Diri Bangsa	Persentase penyelesaian draf Dokumen Program dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	90 - 100% draft dokumen selesai
	Persentase penyelesaian draf Dokumen Monitoring dan Evaluasi Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	90 - 100% draft dokumen selesai
	Indeks Profesionalisme ASN Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	80

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Layanan Dukungan Manajemen Internal	45.600.000,-
Layanan Manajemen Kinerja Internal	0,-
Jumlah Anggaran Efektif*	45.600.000,-

*) Total anggaran dengan blokir menjadi Rp49.217.000.

Jakarta, Januari 2026

Deputi Bidang Koordinasi
Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa,



Warsito

Kepala Bagian Tata Usaha, Deputi Bidang
Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati
Diri Bangsa,



Wiwiek Setiowati



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lilik Kurniawan
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pratikno
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:
Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Pratikno

PIHAK PERTAMA:
Deputi Bidang Koordinasi
Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial,

Lilik Kurniawan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA DAN KONFLIK SOSIAL

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial
 Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	0,137
	Persentase Penurunan Nilai Indeks Risiko Bencana Nasional	1,2
	Indeks Kinerja terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial	82
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial	Memuaskan
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik penanggulangan bencana dan konflik sosial dalam mendukung ketahanan pangan nasional untuk kesejahteraan rakyat	1,5

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial	1.922.626.000,-
Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	8.400.000,-
Jumlah Anggaran Efektif*	1.931.026.000,-

*)Total anggaran dengan blokir menjadi Rp2.927.155.000,-

Jakarta, Januari 2026

Menteri Koordinator
 Bidang Pembangunan Manusia dan
 Kebudayaan,



Pratikno

Deputi Bidang Koordinasi
 Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial,



Lilik Kurniawan



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Monalisa Herawati Rumayar
Jabatan : Asisten Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Lilik Kurniawan
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang Koordinasi
Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial,

Lilik Kurniawan

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputi Rehabilitasi dan
Rekonstruksi,

Monalisa Herawati Rumayar

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA DAN KONFLIK SOSIAL

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Persentase daerah pasca bencana massif yang ditangani	100%
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) dalam penyelesaian isu strategis di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1
	Indeks kinerja terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	82
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Memuaskan
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi bidang Pengurangan Risiko Bencana	Persentase pelaksanaan aksi Reformasi Birokrasi Tematik penanggulangan bencana dan konflik sosial dalam mendukung ketahanan pangan nasional untuk kesejahteraan rakyat	100%

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim	400.060.000,-
Koordinasi	108.396.000,-
Jumlah Anggaran Efektif*	508.456.000,-

*)Total anggaran dengan blokir menjadi Rp706.494.000,-.

Jakarta, Januari 2026

Deputi Bidang Koordinasi
 Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial,



Lilik Kurniawan

Asisten Deputi Rehabilitasi dan
 Rekonstruksi,



Monalisa Herawati Rumayar



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asril
Jabatan : Asisten Deputi Penanganan Pascakonflik Sosial

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Lilik Kurniawan
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang Koordinasi
Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial,

Lilik Kurniawan

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputi Penanganan
Pascakonflik Sosial,

Asril

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA DAN KONFLIK SOSIAL

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Penanganan Pascakonflik Sosial
 Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang Penanganan Pascakonflik Sosial	Rasio kabupaten/kota yang menerapkan infrastruktur berketahanan bencana di lokasi prioritas bencana	19
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) dalam penyelesaian isu strategis di bidang Penanganan Pascakonflik Sosial	1
	Indeks kinerja terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Penanganan Pascakonflik Sosial	82
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Penanganan Pascakonflik Sosial	Memuaskan
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi bidang Pengurangan Risiko Bencana	Persentase pelaksanaan aksi Reformasi Birokrasi Tematik penanggulangan bencana dan konflik sosial dalam mendukung ketahanan pangan nasional untuk kesejahteraan rakyat	100%

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim	353.383.000,-
Koordinasi	271.418.000,-
Jumlah Anggaran Efektif*	624.801.000,-

*) Total anggaran dengan blokir menjadi Rp849.040.000,-.

Jakarta, Januari 2026

Deputi Bidang Koordinasi
 Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial,



Lilik Kurniawan

Asisten Deputi Penanganan
 Pascakonflik Sosial,



Asril



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andre Notohamijoyo
Jabatan : Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Lilik Kurniawan
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang Koordinasi
Penanggulangan dan Konflik Sosial,

Lilik Kurniawan

PIHAK PERTAMA:
Asisten Deputi
Pengurangan Risiko Bencana,

Andre Notohamijoyo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA DAN KONFLIK SOSIAL

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana
 Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang Pengurangan Risiko Bencana	Persentase Penurunan Nilai Indeks Risiko Bencana Nasional	1,2
	Persentase Daerah yang memiliki tingkat kapasitas penanggulangan bencana minimal pada kategori sedang	73
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) dalam penyelesaian isu strategis di bidang Pengurangan Risiko Bencana	1
	Indeks kinerja terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Pengurangan Risiko Bencana	82
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang Pengurangan Risiko Bencana	Memuaskan
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi bidang Pengurangan Risiko Bencana	Persentase pelaksanaan aksi Reformasi Birokrasi Tematik penanggulangan bencana dan konflik sosial dalam mendukung ketahanan pangan nasional untuk kesejahteraan rakyat	100%

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim	359.790.000,-
Koordinasi	60.427.000,-
Jumlah Anggaran Efektif*	420.217.000,-

*)Total anggaran dengan blokir menjadi Rp683.320.000,-.

Jakarta, Januari 2026

Deputi Bidang Koordinasi
 Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial,



Lilik Kurniawan

Asisten Deputi
 Pengurangan Risiko Bencana,



Andre Notohamijoyo



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wulansari Handayani
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Lilik Kurniawan
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

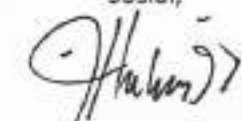
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:
Deputi Bidang Koordinasi
Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial,


Lilik Kurniawan

PIHAK PERTAMA:
Kepala Bagian Tata Usaha, Deputi Bidang
Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik
Sosial,


Wulansari Handayani

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA DAN KONFLIK SOSIAL**

Unit Satuan Kerja : Kepala Bagian Tata Usaha, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial

Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
{1}	{2}	{3}
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial	Persentase penyelesaian draf Dokumen Program dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial	90 - 100% draft dokumen selesai
	Persentase penyelesaian draf Dokumen Monitoring dan Evaluasi Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial	90 - 100% draft dokumen selesai
	Indeks Profesionalisme ASN Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial	80

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Layanan Dukungan Manajemen Internal	8.400.000,-
Layanan Manajemen Kinerja Internal	0,-
Jumlah Anggaran Efektif*	8.400.000,-

*Jumlah anggaran dengan blokir menjadi Rp12.019.000.

Jakarta, Januari 2026

Deputi Bidang Koordinasi
Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial,

Kepala Bagian Tata Usaha, Deputi Bidang Koordinasi
Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial,



Lilik Kurniawan



Wulansari Handayani



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Henry Marvin
Jabatan : Inspektur

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pratikno
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:
Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Pratikno

PIHAK PERTAMA:
Inspektur,

Henry Marvin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Inspektorat
Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kualitas Layanan Pengawasan internal	Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,70
	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Temuan Hasil Pengawasan	86%
	Kapabilitas APIP	Level 2 (2,6)
	Survey Penilaian Integritas	80
	Indeks Manajemen Risiko	3,6
	Jumlah Unit yang Memperoleh Predikat WBK	1

Klasifikasi Rincian <i>Output</i>	Anggaran (Rp)
Layanan Manajemen Kinerja Internal	417.967.000,-
Jumlah Anggaran Efektif	417.967.000,-

Jakarta, Januari 2026

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,



Pratikno

Inspektur,



Henry Marvin



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melinda Paramitha Kusuma Dewi.
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Henry Marvin
Jabatan : Inspektur

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:
Inspektur,

Henry Marvin

PIHAK PERTAMA:
Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat,

Melinda Paramitha Kusuma Dewi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat
Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya Kualitas layanan Pengawasan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Persentase penyelesaian draf dokumen administrasi pengawasan internal	90 - 100% draft dokumen selesai

Jakarta, Januari 2026

Inspektur,



Henry Marvin

Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat,



Melinda Paramitha Kusuma Dewi



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budiono Subambang
Jabatan : Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pratikno
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:
Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan,

Pratikno

PIHAK PERTAMA:
Staf Ahli
Bidang Pembangunan Berkelanjutan,

Budiono Subambang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Organisasi Eselon I : Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan
 Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Tersusunnya kajian Bidang Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pembangunan Berkelanjutan	1
Meningkatnya rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	33
	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	12,5

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Pembangunan Berkelanjutan	185.912.000,-
Jumlah Anggaran Efektif	185.912.000,-

*)Total anggaran dengan blokir menjadi Rp196.493.000,-.

Jakarta, Januari 2026

Menteri Koordinator
 Bidang Pembangunan Manusia dan
 Kebudayaan,



Pratikno

Staf Ahli
 Bidang Pembangunan Berkelanjutan,



Budiono Subambang



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aris Darmansyah Edisaputra
Jabatan : Staf Ahli Bidang Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pratikno
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:
Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

PIHAK PERTAMA:
Staf Ahli
Bidang Hukum dan Tata Kelola
Pemerintahan,

Pratikno

Aris Darmansyah Edisaputra

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Organisasi Eselon I : Staf Ahli Bidang Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan
Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Tersusunnya kajian bidang Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan	1
Meningkatnya Tata Kelola Kelembagaan Kemenko PMK	Nilai Reformasi Birokrasi General	83
	Indeks BerAKHLAK	75

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan	177.522.000,-
Jumlah Anggaran Efektif	177.522.000,-

*)Total anggaran dengan blokir menjadi Rp189.641.000,-.

Jakarta, Januari 2026

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Staf Ahli
Bidang Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan,



Pratikno



Aris Darmansyah Edisaputra



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sorni Paskah Daelli
Jabatan : Plt. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia Berkualitas

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pratikno
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:
Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan,

PIHAK PERTAMA:
Plt. Staf Ahli
Bidang Sumber Daya Manusia
Berkualitas,

Pratikno

Sorni Paskah Daelli

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Organisasi Eselon I : Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia Berkualitas
Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Tersusunnya kajian bidang Sumber Daya Manusia Berkualitas	Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Manusia Berkualitas	1
Tercapainya pemerataan akses dan pelayanan pendidikan prasekolah dalam mendukung tumbuh kembang anak	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	36,61

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Sumber Daya Manusia Berkualitas	139.051.000,-
Jumlah Anggaran Efektif	139.051.000,-

*)Total anggaran dengan blokir menjadi Rp139.051.000,-.

Jakarta, Januari 2026

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Pit. Staf Ahli
Bidang Sumber Daya Manusia Berkualitas,



Pratikno



Sorni Paskah Daeli



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sorni Paskah Daeli
Jabatan : Staf Ahli Bidang Ketahanan Sosial, Ekologi, dan Budaya

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pratikno
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:
Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

PIHAK PERTAMA:
Staf Ahli
Bidang Ketahanan Sosial, Ekologi, dan Budaya,

Pratikno

Sorni Paskah Daeli

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Organisasi Eselon I : Staf Ahli Bidang Sosial, Ekologi, dan Budaya
Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Tersusunnya kajian bidang Ketahanan Sosial, Ekologi, dan Budaya	Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Ketahanan Sosial, Ekologi, dan Budaya	1
Meningkatnya Ketangguhan Sosial dan Institusional Desa dalam Menghadapi Risiko Bencana	Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana	7000 desa/kelurahan

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Ketahanan Sosial, Ekologi, dan Budaya	149.584.000,-
Jumlah Anggaran Efektif	149.584.000,-

*)Total anggaran dengan blokir menjadi Rp149.584.000,-

Jakarta, Januari 2026

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Staf Ahli
Bidang Ketahanan Sosial, Ekologi, dan Budaya,



Pratikno



Sorni Paskah Daeli



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Suwarni
Jabatan : Kepala Biro Umum dan Keuangan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Imam Machdi
Jabatan : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan,

Imam Machdi

PIHAK PERTAMA:
Kepala Biro Umum
dan Keuangan,

Indah Suwarni

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Umum dan Keuangan
 Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kualitas Layanan Umum dan Keuangan	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95
	Indeks Pengelolaan Aset (skala 4)	3,76
	Indeks Tata Kelola Pengadaan (skala 100)	89,5
	Tingkat Digitalisasi Arsip (skala 100)	88,5
	Indeks Opini BPK	WTP
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap dukungan penyelenggaraan layanan Umum dan Keuangan	Memuaskan

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Layanan Dukungan Manajemen Internal	144.542.363.000,-
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2.850.000.000,-
Layanan Manajemen Kinerja Internal	184.634.000,-
Jumlah Anggaran Efektif	147.576.997.000,-

*)Total anggaran dengan blokir menjadi Rp160.618.748.000,-.

Jakarta, Januari 2026

Sekretaris Kementerian Koordinator
 Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan,

Kepala Biro Umum
 dan Keuangan,



Imam Machdi



Indah Suwarni



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reny Putri Septiawati
Jabatan : Kepala Bagian Rumah Tangga

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Indah Suwarni
Jabatan : Kepala Biro Umum dan Keuangan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

Pihak Kedua:
Kepala Biro Umum dan
Keuangan,

Indah Suwarni

Pihak Pertama:
Kepala Bagian Rumah Tangga,

Reny Putri Septiawati

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Kepala Bagian Rumah Tangga, Biro Umum dan Keuangan
Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya kualitas layanan Rumah Tangga Kemenko PMK	Persentase penyelesaian draf dokumen Rumah Tangga Kemenko PMK	90 - 100% draft dokumen selesai

Jakarta, Januari 2026

Kepala Biro Umum dan
Keuangan,

Indah Suwarni

Kepala Bagian Rumah Tangga,

Reny Putri Septiawati



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azhzhairia Choirunissa Hardi
Jabatan : Kepala Subbagian Urusan Dalam dan Pengadaan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Reny Putri Septiawati
Jabatan : Kepala Bagian Rumah Tangga

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:
Kepala Bagian Rumah Tangga,


Reny Putri Septiawati

PIHAK PERTAMA:
Kepala Subbagian Urusan Dalam dan
Pengadaan,


Azhzhairia Choirunissa Hardi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Kepala Subbagian Urusan Dalam dan Pengadaan, Biro Umum dan Keuangan
Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya kualitas layanan Rumah Tangga Kemenko PMK	Persentase penyelesaian draf dokumen urusan dalam dan pengadaan Kemenko PMK	90 - 100% draft dokumen selesai

Jakarta, Januari 2026

Kepala Bagian Rumah Tangga,


Reny Putri Septiawati

Kepala Subbagian Urusan Dalam dan Pengadaan,


Azhzhairia Choirunissa Hardi



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fiki Ikrom Ibrahim
Jabatan : Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Indah Suwarni
Jabatan : Kepala Biro Umum dan Keuangan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:
Kepala Biro Umum dan
Keuangan,

Dra. Indah Suwarni

PIHAK PERTAMA:
Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha
Pimpinan,

Fiki Ikrom Ibrahim

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan, Biro Umum dan Keuangan
Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya kualitas layanan Penatausahaan Pimpinan dan Keprotokolan Kemenko PMK	Persentase penyelesaian draf dokumen Keprotokolan dan Ketatausahaan Kemenko PMK	90 - 100% draft dokumen selesai

Jakarta, Januari 2026

Kepala Biro Umum dan
Keuangan,

Indah Suwarni

Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha
Pimpinan,

Fikri Ikrom Ibrahim



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Verdiawan Bagaskara
Jabatan : Kepala Subbagian Protokol

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Fiki Ikrom Ibrahim
Jabatan : Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:
Kepala Bagian Protokol dan
Tata Usaha Pimpinan,

Fiki Ikrom Ibrahim

PIHAK PERTAMA:
Kepala Subbagian Protokol,

Verdiawan Bagaskara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Kepala Subbagian Protokol, Biro Umum dan Keuangan
Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya kualitas layanan Keprotokolan Kemenko PMK	Persentase penyelesaian draf dokumen bidang keprotokolan	90 - 100% draft dokumen selesai

Kepala Bagian Protokol dan
Tata Usaha Pimpinan,



Fiki Ikrom Ibrahim

Jakarta, Januari 2026

Kepala Subbagian Protokol,



Verdiawan Bagaskara



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Vanda Viyanti
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Fiki Ikrom Ibrahim
Jabatan : Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:
Kepala Bagian Protokol dan
Tata Usaha Pimpinan,

Fiki Ikrom Ibrahim

PIHAK PERTAMA:
Kepala Subbagian Tata Usaha
Menteri Koordinator,

Annisa Vanda Viyanti

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator, Biro Umum dan Keuangan

Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya kualitas layanan Tata Usaha Menteri PMK	Persentase penyelesaian Draf Laporan Tata Usaha Menteri Koordinator	90 - 100% draft dokumen selesai
	Persentase penyelesaian Draf Pedoman Bidang Ketatausahaan Menteri Koordinator	90 - 100% draft dokumen selesai

Kepala Bagian Protokol dan
Tata Usaha Pimpinan,



Fiki Ikrom Ibrahim

Jakarta, Januari 2026

Kepala Subbagian Tata Usaha
Menteri Koordinator,



Annisa Vanda Viyanti



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahma Putriani
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator dan Staf Ahli

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Fiki Ikrom Ibrahim
Jabatan : Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:
Kepala Bagian Protokol dan
Tata Usaha Pimpinan,

Fiki Ikrom Ibrahim

PIHAK PERTAMA:
Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris
Kementerian Koordinator dan Staf Ahli,

Rahma Putriani

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator dan Staf Ahli, Biro Umum dan Keuangan
Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya kualitas layanan Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator PMK dan Staf Ahli	Persentase penyelesaian Draft Laporan Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator dan Staf Ahli	90 - 100% draft dokumen selesai
	Persentase penyelesaian Draft Pedoman Bidang Ketatausahaan Sekretaris Menteri Koordinator dan Staf Ahli	90 - 100% draft dokumen selesai

Jakarta, Januari 2026

Kepala Bagian Protokol dan
Tata Usaha Pimpinan,



Fiki Ikrom Ibrahim

Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris
Kementerian Koordinator dan Staf Ahli,



Rahma Putriani



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Prasetyo
Jabatan : Kepala Biro Komunikasi dan Persidangan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Imam Machdi
Jabatan : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Imam Machdi

PIHAK PERTAMA:
Kepala Biro Komunikasi dan Persidangan,

Budi Prasetyo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Komunikasi dan Persidangan
 Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas layanan informasi publik dan komunikasi, serta pengelolaan persidangan dan perpustakaan	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	96,5
	Survei Kepuasan Masyarakat (skala 100)	90,88
	Indeks Pelayanan Publik (skala 5)	4,17
	Tingkat TL Pengaduan LAPOR (skala 5)	4,2
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap dukungan penyelenggaraan layanan Komunikasi dan Persidangan	Memuaskan

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Layanan Dukungan Manajemen Internal	559.584.000,-
Jumlah Anggaran Efektif	559.584.000,-

*)Total anggaran dengan blokir menjadi Rp834.203.000,-.

Jakarta, Januari 2026

Sekretaris Kementerian Koordinator
 Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan,

Kepala Biro Komunikasi dan Persidangan,



Imam Machdi



Budi Prasetyo



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfa Ruhama
Jabatan : Kepala Bagian Persidangan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Budi Prasetyo
Jabatan : Kepala Biro Komunikasi dan Persidangan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:
Kepala Biro Komunikasi dan Persidangan,

Budi Prasetyo

PIHAK PERTAMA:
Kepala Bagian Persidangan,

Zulfa Ruhama

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Kepala Bagian Persidangan, Biro Komunikasi dan Persidangan
Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya kualitas layanan persidangan Kemenko PMK	Persentase penyelesaian draf dokumen persidangan Kemenko PMK	90 - 100% draft dokumen selesai

Jakarta, Januari 2026

Kepala Biro Komunikasi dan Persidangan,



Budi Prasetyo

Kepala Bagian Persidangan,



Zulfa Ruhama



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Avandra Ardy Nugraha
Jabatan : Kepala Subbagian Risalah dan Dokumentasi Persidangan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Zulfa Ruhama
Jabatan : Kepala Bagian Persidangan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:
Kepala Bagian Persidangan,

Zulfa Ruhama

PIHAK PERTAMA:
Kepala Subbagian Risalah dan
Dokumentasi Persidangan,

Avandra Ardy Nugraha

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Kepala Subbagian Risalah dan Dokumentasi Persidangan, Biro Komunikasi dan Persidangan
Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya kualitas layanan persidangan Kemenko PMK	Persentase penyelesaian draf dokumen risalah persidangan	90 - 100% draft dokumen selesai

Jakarta, Januari 2026

Kepala Bagian Persidangan,



Zulfa Ruhama

Kepala Subbagian Risalah dan Dokumentasi Persidangan,



Avandra Ardy Nugraha



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwiandi Susantyo
Jabatan : Kepala Subbagian Fasilitasi Penyiapan Bahan Persidangan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Zulfa Ruhama
Jabatan : Kepala Bagian Persidangan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:
Kepala Bagian Persidangan,

Zulfa Ruhama

PIHAK PERTAMA:
Kepala Subbagian Fasilitasi Penyiapan
Bahan Persidangan,

Dwiandi Susantyo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Kepala Subbagian Fasilitasi Penyiapan Bahan Persidangan, Biro Komunikasi dan Persidangan
Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya kualitas layanan persidangan Kemenko PMK	Persentase penyelesaian draf dokumen penyusunan bahan persidangan	90 - 100% draft dokumen selesai

Jakarta, Januari 2026

Kepala Bagian Persidangan,



Zulfa Ruhama

Kepala Subbagian Fasilitasi Penyiapan
Bahan Persidangan,



Dwiandi Susantyo



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syarip Hidayat
Jabatan : Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Imam Machdi
Jabatan : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Imam Machdi

PIHAK PERTAMA:
Kepala Biro Hukum, Organisasi,
dan Tata Laksana,

Syarip Hidayat

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana
 Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kualitas Layanan Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana	Indeks Reformasi Hukum	98,30
	Persentase penyelesaian rancangan Peraturan Perundangan-Undangan dan instrumen hukum lainnya	100%
	Persentase penyelesaian dokumen advokasi hukum	100%
	Penilaian Maturitas Kapabilitas Kelembagaan	Level 3 (terdefinisi)
	Persentase penyelesaian instrumen penataan organisasi	100%
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap Dukungan Penyelenggaraan Layanan Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana	Memuaskan

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Layanan Dukungan Manajemen Internal	146.278.000 ,-
Jumlah Anggaran Efektif	146.278.000 ,-

*)Total anggaran dengan blokir menjadi Rp195.451.000,-.

Jakarta, Januari 2026

Sekretaris Kementerian Koordinator
 Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan,



Imam Machdi

Kepala Biro Hukum, Organisasi,
 dan Tata Laksana,



Syarip Hidayat



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Budi Handayani
Jabatan : Kepala Biro Manajemen Kinerja, Kerja Sama, dan Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Imam Machdi
Jabatan : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat:

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Imam Machdi

PIHAK PERTAMA:
Kepala Biro Manajemen Kinerja, Kerja
Sama, dan Sumber Daya Manusia,

Nur Budi Handayani

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Manajemen Kinerja, Kerja Sama dan Sumber Daya Manusia
 Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen Kinerja, Kerja Sama dan Sumber Daya Manusia	Indeks Perencanaan Pembangunan	99,5
	Nilai SAKIP	81,5
	Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama Luar Negeri	92,25
	Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama Dalam Negeri	92,25
	Indeks Profesionalisme ASN (skala 100)	80
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap dukungan penyelenggaraan layanan MKKS SDM	Memuaskan

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Layanan Manajemen Kinerja Internal	279.022.000,-
Layanan Dukungan Manajemen Internal	475.604.000,-
Layanan Manajemen SDM Internal	500.274.000,-
Kebijakan Bidang Sosial	52.779.721.000,-
Jumlah Anggaran Efektif	54.034.621.000,-

*)Total anggaran dengan blokir menjadi Rp59.588.825.000,-.

Jakarta, Januari 2026

Sekretaris Kementerian Koordinator
 Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan,



Imam Machdi

Kepala Biro Manajemen Kinerja, Kerja Sama,
 dan Sumber Daya Manusia,



Nur Budi Handayani



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aria Setia Ningrum
Jabatan : Kepala Bagian Manajemen Kinerja

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Nur Budi Handayani
Jabatan : Kepala Biro Manajemen Kinerja, Kerja Sama, dan Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:
Kepala Biro Manajemen Kinerja, Kerja Sama, dan
Sumber Daya Manusia,



Nur Budi Handayani

PIHAK PERTAMA:
Kepala Bagian Manajemen Kinerja,



Aria Setia Ningrum

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Kepala Bagian Manajemen Kinerja, Biro Manajemen Kinerja, Kerja Sama,
dan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya kualitas layanan Manajemen Kinerja Kemenko PMK	Persentase penyelesaian draf dokumen manajemen kinerja Kemenko PMK	90 - 100% draft dokumen selesai

Jakarta, Januari 2026

Kepala Biro Manajemen Kinerja, Kerja Sama, dan
Sumber Daya Manusia,



Nur Budi Handayani

Kepala Bagian Manajemen Kinerja,



Aria Setia Ningrum



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Gumilar Triyanto
Jabatan : Kepala Biro Digitalisasi dan Pengelolaan Informasi

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Imam Machdi
Jabatan : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA:

- 1) Berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan Lampiran Perjanjian Kinerja ini dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- 2) Mematuhi ketentuan keamanan informasi, menjaga kerahasiaan data dan informasi kedinasan, serta menggunakan sistem dan aset TIK sesuai kebijakan yang berlaku. Kepatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bagian dari evaluasi kinerja dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA:
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Imam Machdi

PIHAK PERTAMA:
Kepala Biro Digitalisasi dan
Pengelolaan Informasi,

Agung Gumilar Triyanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Digitalisasi dan Pengelolaan Informasi
Tahun Anggaran : 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas layanan digitalisasi pengelolaan data dan sistem informasi	Indeks Pemerintah Digital (PEMDI)	2
	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur	3
	Indeks Pembangunan Statistik	3
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap dukungan penyelenggaraan layanan Digitalisasi dan Pengelolaan Informasi	Memuaskan

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Layanan Dukungan Manajemen Internal	258.646.000,-
Jumlah Anggaran Efektif	258.646.000,-

*)Total anggaran dengan blokir menjadi Rp260.077.000,-.

Jakarta, Januari 2026

Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan,

Kepala Biro Digitalisasi dan
Pengelolaan Informasi,



Imam Machdi



Agung Gumilar Triyanto